

CASCADING KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 - 2026

Oleh:
Yozarwardi U.P, S.Hut, M.Si
Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumbar

Padang, Tanggal 17 Februari 2022

VISI, MISI, PRIORITAS DAN TUJUAN STRATEGIS RPJMD 2021-2026



VISI



Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan

Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

03



MISI

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

06



MISI

- 1. Meningkatkan Pendapatan Petani Hutan**
- 2. Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas**



Tujuan
OPD



MISI
3 Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan

Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan
IK = Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan
Target: 5%/Tahun

TUJUAN
OPD



SASARAN OPD

Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yg dikelola Kelompok Masyarakat

IK : Luas kawasan hutan yang dikelola (Hektar)
Target: 250.000 Ha

Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan

IK : Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan (Unit)
Target: 100 Unit



MISI
6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas
IK : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Target: 82,50

TUJUAN
OPD



SASARAN OPD

Meningkatkan kualitas
hutan dan lahan

IK : Indeks Tutupan Hutan
Target: 59,26

CASCADING KINERJA

TUJUAN

1. Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan

IK: Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan

2. Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas

IK: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

3. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

IK: Nilai Akuntabilitas Kinerja

SASARAN OPD/ESELON II

Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang dikelola Kelompok Masyarakat

IK : Luas kawasan hutan yang dikelola (Hektar)

Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan

IK : Indeks tutupan Hutan (indeks)

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

IK : Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan

IK : Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan (Unit)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi

IK : Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi

Eselon II

Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang dikelola Kelompok Masyarakat

Eselon III

Meningkatnya kelembagaan masyarakat yang difasilitasi

IK: Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi

Meningkatnya Lembaga Perhutanan Sosial yang difasilitasi

IK : Jumlah Lembaga PS yang difasilitasi

Eselon IV

Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan

IK: Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya

Meningkatnya Pendampingan kelembagaan masyarakat

IK: Jumlah KTH/ Kelompok Masyarakat yang didampingi

Meningkatnya penyiapan dan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat

IK: Jumlah usulan perhutanan sosial

Meningkatnya Jejaring komunikasi dan koordinasi pelaku dan pendukung PS

IK: Jumlah Forum yang dibentuk

Eselon II

Meningkatnya Unit Usaha Berbasis Kehutanan

Eselon III

Meningkatnya Pengembangan usaha berbasis kehutanan

IK: Jumlah jenis komoditi hasil hutan yang difasilitasi

Meningkatnya budidaya tanaman unggulan dan produktif

IK : Jumlah bibit tanaman unggulan & produktif

Eselon IV

Meningkatnya fasilitasi kewirausahaan kelompok masyarakat

IK: Jumlah Kewirausahaan Kelompok masyarakat yang difasilitasi

Meningkatnya pembibitan tanaman unggulan dan produktif

- IK: 1. Jumlah bibit tanaman unggulan dan produktif pada persemaian permanen dan/atau KBR
2. Jumlah arboretum yang di bangun di KPH
3. Luas ASDG (Area Sumber Daya Genetik) yang dibangun/dipelihara

Meningkatnya sertifikasi perbenihan tanaman hutan

- IK: 1. Jumlah sertifikasi sumber benih
2. Jumlah sertifikasi mutu benih
3. Jumlah sertifikasi mutu bibit

Meningkatnya pengawasan peredaran benih dan/atau bibit

- IK: 1. Jumlah pengada dan pengedar benih dan/atau bibit
2. Jumlah pengawasan peredaran benih dan/atau bibit

Eselon II

Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan (1)

Eselon III

Meningkatnya Rehabilitasi Lahan Kritis
IK: Luas Keberhasilan Tanaman

Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan
IK : % Laju Kerusakan Hutan

Eselon IV

Meningkatnya Penanaman
Lahan Kritis
IK: Luas Lahan Kritis yang
Ditanami

Meningkatnya Konservasi Tanah
dan Air
IK: Jumlah Unit KTA yang
Dibangun

Meningkatnya Wilayah DAS
yang Dikelola
IK: Jumlah DAS yang Dikelola

Meningkatnya Cadangan
Karbon
IK: Jumlah Petak Ukur Permanen
Simpanan Karbon

Eselon II

Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan (2)

Eselon III

Meningkatnya Perlindungan Hutan

IK: % Penurunan Lokasi Rawan Kerusakan Hutan

Menurunnya Kebakaran Hutan dan Lahan

IK: % Penurunan Luas Karhutla

Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Hutan

IK: % Peningkatan Kawasan Hutan yang dikonservasi

Eselon IV

Meningkatnya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan

- (1) Kasus Tindak Pidana Kehutanan yang tertangani
- (2) Jumlah Patroli Pengamanan Hutan
- (3) Jumlah Peta Rawan Kerusakan Hutan
- (4) Jumlah satgas LMPHBN

Meningkatnya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- IK :
- (1) Jumlah Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - (2) Jumlah Pemadaman Karhutla

Meningkatnya kawasan Konservasi Ekosistem

- IK :
- (1) Jumlah Kawasan Ekosistem yang dikonservasi
 - (2) Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Konservasi Ekosistem

Eselon II

Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan (3)

Eselon III

Meningkatnya pematapan kawasan hutan

IK : % dokumen rencana dan tata hutan

Perizinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan baik

IK : % Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai aturan

Meningkatnya produksi kehutanan

IK : % Produksi hasil hutan

Eselon IV

Batas Kawasan hutan yang jelas
IK: Panjang Batas hutan yang dipelihara

Meningkatnya Perencanaan Hutan yang Berkualitas

IK: Persentase kesesuaian lokasi pemanfaatan dan penggunaan yang sesuai dengan tata hutan

Peningkatan informasi sumberdaya hutan

IK: (1) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi
(2) Kegiatan non Kehutanan yang berada dalam kawasan hutan yang terinventarisir
(3) Tersusunnya dokumen NSDH

Meningkatnya pemanfaatan kawasan dan penggunaan kawasan hutan yang berwawasan lingkungan/Penggunaan perizinan kehutanan sesuai aturan

IK: (1) Optimalisasi Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dalam Hutan Produksi
(2) Optimalisasi Kerjasama Pemanfaatan Hutan dalam Hutan Lindung dan Hutan Produksi
(3) Izin Pemanfaatan jasa lingkungan
(4) Optimalisasi Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Lindung dan Hutan Produksi
(5) Optimalisasi izin Penggunaan Kawasan Hutan

Pengembangan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu

IK: (1) Jumlah IUIPHHK sesuai aturan (2) Jumlah IUIPHBK sesuai aturan

Optimalisasi Produksi hasil hutan

IK: (1) Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu
(2) Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu

Pengembangan Industri Primer Kehutanan

IK: Jumlah IUIPHHK yang berkembang

Eselon II

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Eselon III

Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi
IK : Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP

Meningkatnya Kualitas Pelaporan Organisasi
IK : Nilai Komponen Pelaporan pada Evaluasi SAKIP

Meningkatnya pengawasan internal organisasi
IK: Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Evaluasi SAKIP

Eselon IV

Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah tepat waktu
IK: Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun tepat waktu

Tersusunnya Dokumen Pelaporan Organisasi Tepat Waktu
IK : Jumlah Dokumen Pelaporan Organisasi yg disusun tepat waktu

Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan
IK: persentase pengurangan kesalahan hasil verifikasi keuangan

Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan perangkat daerah
IK: Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan perangkat daerah

Meningkatnya Kesesuaian Laporan dg Pedoman Penyusunan Laporan
IK : Persentase Dokumen Pelaporan yg sesuai dg pedoman penyusunan Laporan

Meningkatnya tindak lanjut temuan pemeriksaan
IK: % temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Implementasi Dokumen Perangkat Daerah
IK : Persentase kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah dengan Dokumen Penganggaran

Meningkatnya Pemanfaatan laporan terhadap perencanaan perangkat Daerah
IK : Persentase Hasil evaluasi yg ditindaklanjuti dlm dokumen perangkat Daerah

Meningkatnya ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN tepat waktu
IK: Jumlah ASN yang mengisi LHKPN/ LHKASN tepat waktu

Eselon II

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi

Eselon III

Penempatan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan

IK : %pegawai yang penempatannya sesuai dengan peta jabatan atau persentase keterisian peta jabatan

Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian

IK: 1. Persentase layanan adm kepegawaian sesuai SOP
2. Persentase layanan surat menyurat sesuai SOP
3. Persentase Layanan Saprass sesuai SOP

Meningkatnya pengelolaan BMD

IK: 1. Persentase BMD dalam kondisi baik
2. % Pemenuhan Kebutuhan Saprass pendukung kinerja

Meningkatnya Kapasitas SDM Organisasi

IK : Jumlah SDM yang mengikuti Pengembangan Kompetensi

Eselon IV

Ketersediaan data kepegawaian yang akurat

IK: Persentase ketersediaan data kepegawaian

Tersusunnya Uraian Tugas ASN sesuai regulasi

IK : Dokumen Uraian tugas yg sesuai regulasi

Ketersediaan Dokumen Analisa Jabatan dan Peta Jabatan yg sesuai dengan regulasi

IK : 1. Dokumen Anjab yg sesuai dg regulasi
2. Dokumen Peta Jabatan yg sesuai dg regulasi

Tersusunnya Dokumen SOP sesuai regulasi

IK : Dokumen SOP yg sesuai regulasi

Meningkatnya Kapasitas SDM pemberii Layanan

IK : Jlh SDM layanan yang kompeten

Meningkatnya BMD yang diadakan dan dipelihara

IK : 1. Jumlah Aset yg diadakan
2. Jumlah Aset yg dipelihara
3. Persentase Aset yang tidak bermanfaat yang sudah dihapuskan

Meningkatnya Pengamanan BMD sesuai regulasi

IK : 1. Persentase Aset yang diinventaris
2. Persentase Data Aset yang sudah di Rekon
4. Persentase Aset yg sudah diasuransikan

Tersusunnya Data Kebutuhan pengembangan Kapasitas SDM

IK : Dokumen Data Riwayat Pengembangan Kapasitas SDM yg tersusun

Tersusunnya Rencana Kebutuhan pengembangan Kapasitas SDM

IK : Dokumen Rencana kebutuhan Pengembangan Kapasitas SDM yang tersusun

TARGET PROGRAM UNGGULAN RPJMD TAHUN 2021-2026

Keputusan Gubernur Sumbar No. 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Progul Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET						TOTAL
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan (benih/bibit)							
	a. Jumlah Bibit (batang)	400.000	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	5.500.000
2	Jumlah kegiatan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan yang dilakukan (kali)							
	a. Jumlah kasus tertangani (kasus)	2	2	2	2	2	2	12
	b. Jumlah Patroli Pengamanan Hutan yang dilakukan (kali)	100	100	100	100	100	100	600
	c. Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan (kali)	100	100	100	100	100	100	600
3	Jumlah sarana dan prasarana pendukung produksi kehutanan yang disediakan (unit)							
	a. Jumlah Alat Produktif yang disediakan (unit)	10	10	20	20	20	20	100
	b. Jumlah sarana dan prasarana Ekowisata yang disediakan (unit)	10	10	20	20	20	20	100
	c. Jumlah Stup lebah madu yang disediakan (unit)	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.400
4	Persentase peningkatan mutu dan nilai tambah produksi kehutanan (%)	-	20	20	20	20	20	
5	Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)							
	a. Jumlah enterpreneur baru urusan Kehutanan (orang)	500	500	500	500	500	500	3.000
6	Luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat (Hektar)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000



Ir. Yozarwardi Usama Putra, S.Hut, M.Si, IPU
(Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumbar)



081271501266



Yozarwardi Yoz



Yozarwardi Yoz



yozarwardi.usama1234@gmail.com